

Plagiasi Satu Yenni Mangoting

by Yenni Mangoting

Submission date: 29-Jun-2022 12:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1864472502

File name: artikel_Yenni_Mangoting_untuk_plagiasi.docx (283.42K)

Word count: 6064

Character count: 41728

APAKAH INTRUSI BUDAYA DALAM *E-TAX SYSTEM* DAPAT MENDETEKSI KECURANGAN WAJIB PAJAK?

Abstrak

Tujuan utama – Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari interaksi budaya dan *e-tax system* dalam mendeteksi tindakan kecurangan wajib pajak.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan wajib pajak orang pribadi sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan SEM PLS (*Partial Least Square*).

Temuan utama – Teori Budaya Hofstede terbukti relevan dalam mendeteksi perilaku kecurangan wajib pajak. Wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi akan melegalkan kecurangan pajak untuk menyejaterakan diri.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Wajib pajak dengan budaya maskulin yang tinggi akan meningkatkan penggelapan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengidentifikasi faktor budaya wajib pajak dan menentukan langkah-langkah mitigasi dampak negatif budaya wajib pajak melalui kebijakan perpajakan.

Kebaruhan Penelitian – Penelitian ini menawarkan solusi membangun kepatuhan pajak berbasis teknologi informasi berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada budaya wajib pajak.

Kata kunci: *e-tax system, kecurangan pajak, individualisme, maskulinitas*

15

Abstract

The main objective – This study aims to examine the interaction of the *e-tax system* and culture, whether it can affect the fraudulent behaviour of taxpayers.

Method – This study uses survey approach with individual taxpayers as a sample. Data analysis is carried out using SEM PLS (*Partial Least Square*).

Theory and Practical Implications – Taxpayers with a high masculine culture will increase tax evasion. Therefore, tax authorities need to identify the cultural factors of taxpayers and determine the steps to mitigate the negative impact of taxpayer's culture through taxation policies.

Novelty – This research offers a solution to build tax compliance based on information technology with an approach that is oriented towards the culture of the taxpayer.

Keywords: *e-tax system, individualism, masculinity, tax evasion*

PENDAHULUAN

Selain berdampak terhadap perubahan signifikan dalam model bisnis dan lalu lintas transaksi ekonomi termasuk perilaku wajib pajak, pandemi Covid-19 juga berdampak pada pelemahan kemampuan ekonomis wajib pajak. Perubahan kondisi ekonomi menjadi lebih sulit ini membuat semakin banyak wajib pajak memilih memanfaatkan kecurangan pajak sebagai jalan meningkatkan kemampuan ekonomis. Penelitian oleh Nurunnabi (2017) menyatakan bahwa wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi cenderung melakukan *accounting fraud* seperti memanipulasi penghasilan mereka menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya demi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kemudian jika mereka telah melakukan kecurangan tersebut di masa lampau, besar kemungkinan perilaku tersebut akan kembali dilakukan. Hal ini terjadi terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu diperlukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan untuk mengurangi praktik manipulasi akuntansi dalam rangka kecurangan pajak. OECD merekomendasikan agar otoritas pajak memperluas modernisasi sistem perpajakan dengan mengimplementasikan *e-tax system* yang tidak terbatas pada *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. Modernisasi sistem administrasi pajak secara lebih luas dapat menjamin keandalan dalam pengawasan dan transparansi yang berdampak pada berkurangnya kecurangan pajak. (Kitsios et al., 2022; Mascagni et al., 2021; Paoki et al., 2021; Uyar et al., 2021). Otoritas pajak Indonesia menyambut baik tawaran OECD tersebut. Baru-baru ini sebagai tindak lanjut dari perubahan tarif PPN 11% yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, otoritas pajak mengimplementasikan penggunaan e-Faktur 3.2 sekaligus sebagai upaya penyeragaman sistem administrasi. Kelanjutan modernisasi *e-system* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dilaksanakan dengan membangun *core tax system* menggunakan model *blockchain technology* yang mengintegrasikan sistem administrasi pajak dengan sistem lain.

Ketika *e-tax system* diperluas, persoalan berikutnya adalah bagaimana mengubah perilaku kepatuhan pajak dengan kehadiran *e-tax system* yang memberikan kemudahan memenuhi kewajiban perpajakan (Hambali, 2020; Natasya et al., 2019; Wimayo, 2018). Meskipun administrasi pajak memiliki modal besar dalam membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak (Walsh, 2012), pemahaman yang lebih baik tentang motif wajib pajak dan sikap serta perilaku mereka terhadap pengembangan administrasi perpajakan berbasis *e-system* dapat meningkatkan kepatuhan

sukarela dan efisiensi administrasi pajak. Inovasi dan digitalisasi yang diusung oleh layanan *e-tax system* memang tidak bisa dinafikan. Namun demikian, *e-tax system* dalam perspektif wajib pajak kerap dikaitkan dengan mudahnya otoritas pajak mendeteksi tindakan penghindaran atau kecurangan pajak karena informasi yang terformat digital akan terintegrasi dan mudah diakses sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah melacak dan menganalisis transaksi-transaksi ekonomi wajib pajak untuk menguji kepatuhan pajak (Alm, 2021). Bahkan, wajib pajak membaca adanya risiko melekat yang lebih besar dari manfaat yang dirasakan telah mempengaruhi niat menggunakan *e-tax system* (Rifat et al., 2019). Pro kontra keberadaan *e-tax system* dalam sistem administrasi perpajakan menjadi objek yang menarik untuk diteliti.

Sistem perpajakan akan menimbulkan beragam perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan bergantung pada sejauh mana wajib pajak menilai apakah sistem perpajakan dan interaksi dengan otoritas pajak berjalan baik (Gaber & Gruevski, 2018). Budaya pajak merupakan konsep multidisiplin yang di satu sisi terungkap melalui pendekatan aktivitas, artinya wajib pajak akan menunjukkan budaya pajak yang baik ketika memiliki moral dan pengetahuan tentang sistem perpajakan (Korostelkina et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan interaksionis faktor budaya terhadap hubungan *e-tax system* dan kecurangan pajak. Budaya jarang dianggap sebagai faktor kontekstual yang menonjol dalam studi empiris tentang pengembangan *e-government* atau layanan-layanan pemerintah dan ekonomi digital (Ali et al., 2018). Sehingga, salah satu kontribusi penting adalah mengintegrasikan budaya ke dalam penelitian ini dan menguji efeknya secara empiris. Budaya dalam KBBI dimaknai sebagai kebiasaan individu yang sulit untuk diubah. Individu dengan kecerdasan budaya akan mampu beradaptasi dengan keragaman pengaruh yang timbul dalam lingkungannya. Respon wajib pajak terhadap kecurangan pajak bergantung pada bagaimana budaya wajib pajak menerjemahkan manfaat yang dirasakan melalui pembayaran pajak. Misalnya menurut Sullivan (2020), wajib pajak dengan budaya kolektivisme yang tinggi akan menganggap akumulasi kekayaan yang mereka peroleh wajib didistribusikan kembali ke masyarakat lain melalui pembayaran pajak. Namun demikian, pada masyarakat dengan tingkat individualistik yang tinggi, justru memandang kebijakan perpajakan dapat mengurangi kemampuan ekonomis mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Rifat et al., (2019) mengaitkan siswa dengan kecerdasan budaya mampu berperilaku inovatif akibat berinteraksi dengan keragaman budaya. Ketika pajak dipromosikan sebagai kegiatan yang menyenangkan, menguntungkan dan menolong negara, hal tersebut akan membentuk sikap positif sehingga mengembangkan budaya pajak yang berdampak pada perilaku kepatuhan pajak (Korostelkina et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan budaya Hofstede, terutama individualisme dan maskulinitas sebagai faktor intervensi untuk mengetahui sejauh mana budaya mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam penggunaan teknologi informasi. Dimensi individualisme dan maskulinitas dipilih karena penelitian Hofstede (2001) menyatakan bahwa Indonesia memiliki indeks skor 14 yang menandakan tipe masyarakat kolektif, dimana cenderung tidak terlalu mementingkan pencapaian individu demi fokus lebih besar, yaitu pencapaian tujuan kelompok (Bame-Aldred et al., 2013). Lalu skor 46 untuk maskulinitas menandakan Indonesia berada pada tingkat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, namun tidak termasuk dalam kategori sangat rendah hingga dapat dikatakan sebagai bagian dari feminitas. Berdasarkan teori budaya yang dikembangkan oleh Hofstede, masyarakat atau wajib pajak dengan budaya individualisme yang menonjolkan sikap menempatkan kepentingan pribadi dan keluarga sebagai prioritas telah terbukti memiliki kepatuhan pajak rendah karena tidak melihat pajak adalah pembayaran yang mendatangkan keuntungan (Bani-Mustafa et al., 2020). Bani-Mustafa et al., (2020) juga menjelaskan bahwa masyarakat atau wajib pajak maskulinitas tinggi yang menonjolkan sisi kekuatan dominan dalam menyelesaikan masalah cenderung memiliki agresivitas pajak tinggi. Dengan demikian, memahami kepatuhan pajak seharusnya tidak terbatas antara lain pada kualitas layanan otoritas pajak tetapi memasukkan faktor budaya. Menarik untuk dicermati bagaimana budaya mampu mengubah perilaku individu, mengingat budaya pada dasarnya dikonstruksi secara sosial. Menurut Andriani et al., (2022) peran individu dan nilai-nilai wajib pajak sendirilah yang mendorong preferensi dan sikap mereka dalam kontribusi kepada publik. Pernyataan ini semakin menekankan bahwa budaya masyarakat serta nilai-nilai individu harus dipertimbangkan ketika otoritas pajak dan pemerintah merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Interaksi pengaruh budaya dengan *e-tax system* yang akan dikaji dalam penelitian ini, dibangun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa kepatuhan pajak merupakan pengambilan keputusan etis yang terlibat dalam perilaku wajib pajak saat menjalankan kewajiban pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh *e-tax system* terhadap kecurangan pajak. Lebih lanjut, pengaruh interaksi *e-tax system* dengan budaya terhadap perilaku manipulasi akuntansi untuk menggelapkan pajak juga akan diuji.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan sudut pandang baru bagi otoritas pajak terkait faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain faktor seperti penyediaan fasilitas, insentif dan lainnya, regulator perlu membingkai kebijakan perpajakan yang berorientasi pada budaya wajib pajak sebagai salah satu faktor penentu persepsi mereka untuk memaksimalkan efektifitas implementasi kebijakan. Sehingga kedepannya pelaporan yang dilakukan wajib pajak, baik untuk keperluan akuntansi maupun pajak dilakukan dengan jujur sesuai kebijakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel independen, dependen dan moderasi. Variabel independen pada penelitian ini adalah *technology information*. Sebaliknya, variabel dependen yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah *tax evasion*. Selain itu, peneliti menggunakan variabel moderasi berupa *individualism* dan *masculinity* yang diduga dengan kehadiran kedua variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *e-tax system* dalam rangka mengurangi *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan metode *survey* berupa pengumpulan data dari kuesioner yang disebarakan secara online pada tahun 2022. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-tax system* dengan moderasi budaya pada perilaku wajib pajak. Jumlah sampel adalah 120, dimana 47,5% diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 52,5% sisanya berjenis kelamin pria. Rata-rata responden berdomisili di Surabaya (48,3%) dan sisanya (51,7%) tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Pekerjaan responden sebagai karyawan swasta (71,6%) dan sisanya (28,4%) memiliki pekerjaan yang beragam, salah satunya seperti melakukan pekerjaan bebas. Pada periode dilakukannya penelitian, mayoritas responden telah melakukan pendaftaran kewajiban perpajakan mereka melalui layanan online yang disediakan pemerintah. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab menggunakan layanan online sebagai media untuk pendaftaran kewajiban pajak sebesar 94,2%, sedangkan hanya 5,8% yang masih menggunakan layanan manual. Kriteria responden dari kuesioner yang disebarakan ialah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Indonesia, dalam arti telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jawaban responden dari kuesioner diukur berdasarkan skala *likert* 5 poin untuk mengukur sifat wajib pajak pribadi. Model data penelitian ini diolah menggunakan aplikasi WarpPLS. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah SEM PLS (*Partial Least Square*) karena peneliti ingin menguji keterkaitan pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen beserta moderasinya. Berikut ini adalah model persamaan yang digunakan:

$$TE = \alpha + \beta_1 IT + \beta_2 (IT * MAS) + \beta_3 (IT * IDV) + \varepsilon$$

Pada abad ke dua puluh satu ini, *information technology* (IT) berperan sebagai pembentuk ekonomi (Umar & Masud, 2020). Pengaruhnya meningkat dengan sangat cepat ke seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali pada proses administrasi pajak. Dalam penelitian ini, *information technology* sebagai variabel independen menggunakan konsep *e-government*. *E-government* memiliki banyak layanan, salah satunya terkait pajak atau yang dikenal sebagai *e-tax system*. *E-tax system* sendiri merupakan platform yang memungkinkan wajib pajak mengumpulkan dokumen-dokumen pajak mereka melalui internet (Wasao, 2014), sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas dan keperluan mobilitas wajib pajak karena dapat dilakukan dimanapun. Pertanyaan kuesioner terkait *e-tax system* berfokus pada penggunaan teknologi dibidang perpajakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya, sekaligus sebagai upaya mengurangi tindak kecurangan dalam pajak (Night & Bananuka, 2020; Akram et al., 2019). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mempertanyakan persetujuan responden mengenai apakah implementasi *e-tax system* mendorong wajib pajak menggunakan sistem pajak elektronik dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak, apakah penggunaan *e-tax system* menolong mereka melakukan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, apakah *e-tax system* memberikan informasi yang lebih akurat terkait pajak, serta apakah *e-tax system* menolong mereka terhindar dari perilaku pelanggaran.

Kesiapan dan penerapan *e-tax system* maupun layanan *e-government* lainnya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya ialah budaya nasional. Lebih lanjut melalui pengaruhnya pada adopsi, penerimaan dan pemanfaatan teknologi, budaya nasional dapat mempengaruhi sejauh mana tujuan penerapan *e-tax system* tercapai (Nam, 2018). Budaya nasional Hofstede merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian akademis. Variabel budaya Hofstede menjelaskan esensi budaya nasional dengan cara yang berguna dalam penelitian akademis (Tsakumis et al., 2007; Richardson, 2008). Dalam penelitian ini, dimensi budaya Hofstede yang digunakan adalah *individualism* dan *masculinity*. Dimensi individualisme (IDV) mengukur tingkat ketergantungan individu pada kelompok, sedangkan dimensi maskulinitas (MAS) mengukur orientasi nilai yang dominan pada masyarakat (Hofstede, 2011). Pertanyaan kuesioner sebagai indikator individualisme fokus pada proses pengambilan keputusan individual, apakah lebih berfokus pada diri sendiri atau sudut pandang sosial. Melalui pertanyaan kuesioner

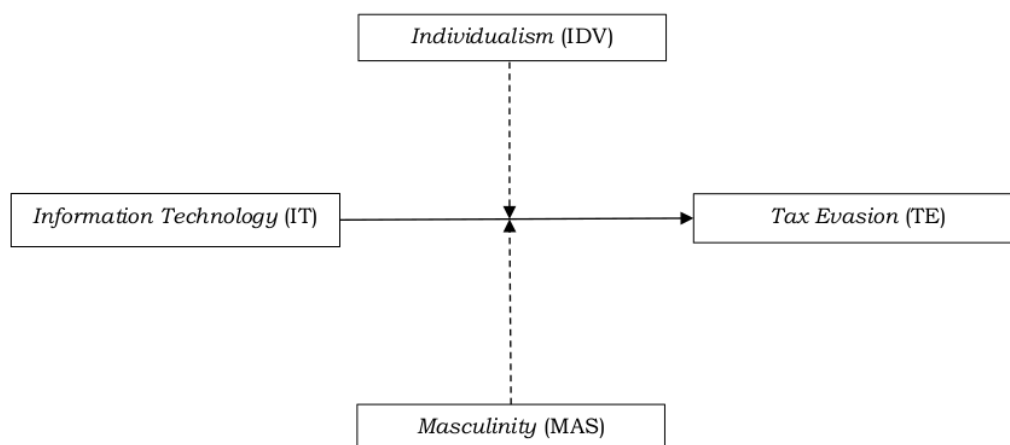
dapat dilihat kecenderungan individual masing-masing wajib pajak, terutama pendapat mereka mengenai pentingnya manfaat yang diterima secara individu setelah melakukan pembayaran pajak, pemenuhan kewajiban pajak yang tidak mempertimbangkan dampak bagi masyarakat, ketidakpedulian wajib pajak akan kesulitan pengumpulan pajak negara, pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan hanya jika bermanfaat bagi diri sendiri, serta pendapat mengenai tidak perlunya membayar pajak apabila hasilnya diberikan kepada orang lain. Sedangkan pertanyaan kuesioner sebagai indikator maskulinitas berfokus pada sejauh mana individu berorientasi pada kompetisi dan kesuksesan (Seno et al., 2022). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan preferensi wajib pajak saat berhadapan dengan otoritas pajak. Apakah wajib pajak cenderung mempertahankan keputusan yang telah dibuat dan menyanggah otoritas pajak atau memilih bernegosiasi dengan mereka, terutama dalam gugatan pajak. Selain itu juga mempertanyakan kepercayaan diri wajib pajak dalam membuat keputusan terkait dengan permasalahan perpajakan yang harus dihadapi.

Kecurangan pajak (TE) merupakan tindakan penggelapan pajak yang melanggar hukum. Pengambilan keputusan wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka anut seperti budaya, kepercayaan maupun lingkungan sekitar (Seno et al., 2022). Pertanyaan kuesioner sebagai indikator kecurangan pajak berfokus pada persepsi wajib pajak mengenai suatu kondisi dalam perilaku kecurangan pajak (McGee et al., 2012). Masing-masing wajib pajak dipertanyakan pilihannya ketika dihadapkan pada situasi yang dapat menggugah niat untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti ketidakmampuan membayar pajak, ketidakadilan sistem perpajakan, pembenaran tindakan pelanggaran pajak apabila semua orang melakukannya, pengkorupsian dana pajak, rendahnya persentase penangkapan akibat tindakan pelanggaran pajak, serta dana pajak negara yang terbuang percuma.

11 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

<i>Direct Effect</i>	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-value</i>
IT → TE	-0,386	<0,001
MAS*IT → TE	-0,363	<0,001
IDV*IT → TE	-0,045	0,310



Gambar 1. Hasil Model Penelitian

Pengujian model penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1. Pengujian model pada penelitian ini ditunjukkan melalui nilai *p-value* dan *R-square*. Rentang nilai dari *R-square* berkisar dari 0 sampai 1, dimana semakin besar angkanya dapat dikatakan memiliki pengaruh yang semakin kuat (Usakli & Kucukergin, 2018). *R-square* pada penelitian ini adalah 0,50 dimana artinya memiliki pengaruh yang cukup kuat. Kemudian berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$TE = \alpha - 0,386IT - 0,363(IT * MAS) - 0,045(IT * IDV) + \varepsilon$$

Persamaan ini merepresentasikan bahwa variabel teknologi informasi (dalam hal ini *e-tax system*) memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan pajak. Lalu untuk maskulinitas sebagai variabel

moderasi ditemukan memberikan pengaruh positif, sedangkan budaya individualisme tidak memiliki pengaruh signifikan dalam interaksinya dengan teknologi informasi terhadap kecurangan pajak.

e-Tax System terhadap Kecurangan Pajak.

Berdasarkan informasi dalam Tabel 1, membuktikan bahwa penggunaan *e-tax system* yang semakin tinggi dapat mengurangi kecurangan pajak yang ditunjukkan dengan nilai *p-value* kurang dari 0,01 dengan *path coefficient* (nilai β) sebesar -0,39. Hasil penelitian terdahulu milik (Adeniyi & Adesunloro, 2017), (Night & Bananuka, 2020), (Babici et al., 2019), dan (Paoki et al., 2021) juga menyatakan bahwa tindakan kecurangan pajak akan berkurang apabila penggunaan *e-tax system* tinggi. Pemenuhan kewajiban pajak terutama dalam hal pelaporan pajak dipermudah karena kehadiran teknologi, terutama *e-tax system*. Menurut (Paoki et al., 2021), upaya modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari pengembangan fasilitas perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, menyediakan akses mudah ke informasi tentang kewajiban perpajakan dan pelaporan, menyajikan metode sederhana untuk pembayaran pajak, mengurangi interaksi tatap muka dengan otoritas pajak, serta memfasilitasi perluasan kapasitas audit. Penggunaan *e-tax system* dapat menyederhanakan beberapa aspek, terutama dalam pengisian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pelaporan SPT secara daring melalui *e-tax system* dapat membuat wajib pajak lebih taat dan tepat waktu dalam melakukan pelaporan pajak. Risiko pajak yang lebih kecil dan pembayaran pajak yang maksimal dihasilkan pada penggunaan *e-tax system* berkualitas tinggi (Hamilton & Stekelberg, 2016). Di sisi lain, kehadiran *e-tax system* dapat membantu kinerja petugas pajak menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan informasi mengenai setiap wajib pajak serta melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Lebih lanjut, implementasi *e-tax system* dapat mempermudah proses audit laporan keuangan karena otoritas pajak dapat dengan mudah melacak jejak yang ditinggalkan wajib pajak dalam transaksi bisnis mereka, sehingga dapat membuat proses pencarian data dalam rangka pengujian kepatuhan menjadi lebih singkat dan tepat. Dengan ini, otoritas pajak dapat dengan mudah menemukan wajib pajak yang melakukan manipulasi laporan keuangan atau bentuk kecurangan akuntansi lainnya untuk mengurangi jumlah pajak terhutang yang seharusnya dibayarkan. Misalnya dengan memanfaatkan fasilitas negara *tax haven*, menggunakan harga *transfer* yang tidak wajar, serta melakukan pencucian uang. Maka dari itu, penerapan *e-tax system* dapat menstimulus wajib pajak untuk melaporkan pajak sesuai keadaan sebenarnya dan meminimalisir tindakan kecurangan pajak.

Interaksi Budaya Individualism dan e-Tax System terhadap Kecurangan Pajak

Hasil pengujian moderasi dalam tabel 1 menunjukkan *individualism* tidak dapat memoderasi pengaruh *e-tax system* terhadap kecurangan pajak dengan nilai *p-value* 0,31 dan nilai koefisien negatif $\beta = -0,04$. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya individualisme wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingginya penggunaan *e-tax system* untuk mengurangi kecurangan pajak. Hasil ini memang tampak berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa individualisme wajib pajak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Sifat ke “aku” akan tampak dalam masyarakat dengan individualisme tinggi yang hanya berfokus pada diri sendiri. Dalam perspektif makro, masyarakat dalam suatu negara dengan budaya individualisme tinggi memberikan pembenaran terhadap kecurangan pajak. Masyarakat di negara tersebut tidak melihat manfaat dan sesuatu yang menguntungkan dengan membayar pajak (Bani-Mustafa et al., 2020).

Bukan suatu rahasia bahwa membayar pajak memunculkan sikap dilema wajib pajak (Gangl et al., 2015). Dilema menyulitkan wajib pajak karena persepsi bahwa pajak dibangun berdasarkan kontrak psikologis dengan pemerintah sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diberikan akan menempatkan wajib pajak pada posisi memilih patuh atau tidak patuh. Pola pikir wajib pajak yang individualistik akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Wajib pajak yang individualistik menggunakan prinsip “economic individualism” yang memandang bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah sebuah hasil kerja keras sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Dengan prinsip “economic individualism” ini, wajib pajak yang umumnya berada di negara-negara maju akan resisten terhadap kebijakan pajak ketika penghasilan yang mereka dapatkan dengan kerja keras didistribusikan untuk dimanfaatkan oleh komunitas lain melalui implementasi kebijakan perpajakan (Sullivan, 2020). Sikap resisten ini dapat menyebabkan wajib pajak berani mengambil resiko untuk melakukan tindakan seperti *income smoothing* pada laporan keuangan demi memperoleh laba lebih banyak dan pajak terhutang lebih sedikit. Hal ini sesuai dengan penelitian Liu & Wu (2020) yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan budaya individualisme cenderung lebih berani mengambil resiko, sehingga mengarahkan pada volatilitas lebih tinggi dalam pendapatan aktual dan mendorong untuk terlibat dalam praktik manajemen laba. Bahkan wajib

pajak yang individualistik menurut Sullivan (2020) berani menentang dan mengatakan pemerintah tidak adil dan menghilangkan hak individu, ketika upaya menumpuk penghasilan hasil dari kerja keras tergerus oleh kebijakan tarif pajak yang tinggi. Pernyataan diatas sejalan dengan individualisme dalam konsep budaya Hofstede dikaitkan dengan adanya jarak dalam hubungan antara individu. Semakin longgar saling ketergantungan di dalam suatu masyarakat menandakan tingkat individualisme tinggi (Hofstede, 2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh individualisme wajib pajak ditemukan memiliki efek moderasi yang tidak signifikan dengan p -value 0.31. Sifat wajib pajak tidak berorientasi pada tinggi rendahnya karakter individualistik. Wajib pajak dalam penelitian ini tidak menunjukkan faktor independensi yang tinggi sebagai penciri dari karakter individualistik, namun tidak juga menunjukkan faktor dependen yang tinggi sebagai ciri dari karakter kolektivisme. Markus & Kitayama (1991) menjelaskan budaya Amerika cenderung mengutamakan individu yang mandiri dari ketergantungan dengan orang lain sedangkan budaya Asia menekankan keterkaitan mendasar individu satu sama lain. Dua kecenderungan inilah yang tampak dalam responden penelitian sehingga hasil uji moderasi budaya individu gagal mempengaruhi penggunaan *e-tax system* untuk mengurangi kecurangan pajak. Sejalan dengan itu, Aldhian & Damayanti (2021) juga mengatakan bahwa individualisme pada suatu negara tidak mempengaruhi sikap mereka untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori budaya Hofstede (2011) yang mengatakan bahwa masyarakat dengan persepsi individualisme akan memandang individu sebagai seorang yang otonom tidak mengikatkan diri pada suatu komunitas atau golongan. Dapat dijelaskan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya apa adanya sebagai bagian dari kewajiban berbangsa dan bernegara.

Sikap individualistik tidak selalu berujung pada tindakan negatif. Dalam kaitannya dengan aktivitas manipulasi dan kecurangan, wajib pajak dengan tingkat individualisme rendah atau kolektifis dapat lebih mungkin untuk terlibat. Penelitian Nguyen et al., (2021) menemukan bahwa tindakan penipuan akuntansi memerlukan kooperasi oleh lebih dari satu pihak agar lebih mudah untuk dilakukan. Wajib pajak akan bekerjasama dengan pihak lain seperti auditor, konsultan pajak, atau bahkan regulator pajak untuk memanipulasi akun-akun dalam laporan keuangan demi memperoleh keuntungan dari kecurangan pajak. Disisi lain, wajib pajak dengan individualisme tinggi justru cenderung lebih jujur dalam pelaporan keuangannya termasuk untuk keperluan pajak, karena berprinsip bahwa ketentuan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah telah memenuhi standar nilai untuk semua orang, sehingga wajib untuk dilaksanakan (Radzia, 2020). Pernyataan tersebut mendukung hasil ini, bahwa penggunaan *e-tax system* direspon standar dan pada umumnya oleh wajib pajak sebagai kebijakan perpajakan yang memang seharusnya diimplementasikan oleh otoritas pajak dalam rangka adaptasi terhadap kehadiran teknologi. Wajib pajak tidak melibatkan perasaan budaya dalam pengambilan keputusan apakah akan memanfaatkan *e-tax system* untuk mengurangi pembayaran pajak karena menganggap manfaat dan dampak dari ketentuan perpajakan ini merata karena ketentuan undang-undang pajak berlaku bagi setiap orang dengan cara yang sama, sehingga wajib pajak tidak melakukan tindakan kecurangan pajak.

Interaksi Budaya Masculinity dan e-Tax System dengan Kecurangan Pajak.

Berbeda dengan hasil yang diperoleh dalam pengujian *individualism*, hasil pengujian moderasi *masculinity* menunjukkan adanya pengaruh yang dapat memoderasi relasi antara *e-tax system* dan kecurangan pajak dengan nilai p value <0.01 dan nilai koefisien negatif β = -0.36. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya *masculinity* wajib pajak memberi pengaruh negatif atau dapat melemahkan pengaruh penggunaan *e-tax system* dalam upaya mengurangi kecurangan pajak. Definisi *masculinity* sendiri dalam budaya (Hofstede, 2011) dapat digambarkan sebagai pilihan peran sosial dan pengaruhnya pada konsep diri. Negara dengan budaya maskulin memandang kompetisi dan pencapaian secara material yang terlihat sebagai nilai penting. Sebaliknya pada budaya maskulin rendah atau yang lebih dikenal dengan femininitas, masyarakat cenderung mengutamakan kesederhanaan, kepedulian dan kualitas hidup. Wajib pajak dengan budaya yang cenderung maskulin lebih berorientasi pada dimensi sifat laki-laki yang mengandung dimensi dari sangat asertif dan kompetitif (Hofstede, 2011). Dalam penelitian Liu & Wu (2020) diketahui bahwa wajib pajak dengan budaya maskulin akan berusaha untuk meningkatkan ego, kekayaan, dan pengakuan sehingga fokus pada mengejar kesuksesan finansial yang menyebabkan kecenderungan untuk melakukan kecurangan juga lebih tinggi. Wajib pajak tidak akan segan melakukan praktik manajemen laba demi memenuhi target keuangan tujuan mereka. Hal ini menyebabkan praktik manajemen laba menjadi lebih lazim dilakukan oleh masyarakat dengan budaya maskulin tinggi. Sehingga dalam budaya maskulin terdapat kemungkinan lebih besar wajib pajak juga membenarkan tindakan *tax evasion* sebagai salah satu upaya mereka mencapai kesuksesan finansial.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menyatakan bahwa budaya *masculinity* tidak memberi pengaruh signifikan pada penggunaan teknologi dalam hal kepatuhan wajib pajak (Zhao, 2011; Zhao et al., 2015; Ali et al., 2018). Pengaruh tidak signifikan yang ditemukan penelitian-penelitian tersebut cenderung diakibatkan oleh hanya menggunakan data sekunder. Meskipun data sekunder yang digunakan bersumber dari lembaga atau tim penelitian berpengalaman, data tersebut tetap terbatas oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi secara berkelanjutan. Misalnya faktor seperti invasi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada budaya suatu negara (Zhao, 2011). Oleh karena itu, tetap diperlukan pengumpulan data primer dari komunitas internasional, nasional atau lokal melalui penelitian yang ekstensif dan ekletik (Ali et al., 2018).

Keinginan memperoleh pengakuan atas kesuksesan finansial yang diiringi sifat egois wajib pajak sebagai ciri budaya maskulinitas tinggi membuat mereka memiliki pendapatan lebih tinggi yang diperoleh melalui kecurangan pajak. Lannai et al., (2020) mendukung pendapat ini dengan temuan penelitian mereka yang menyatakan bahwa Individu dalam negara dengan budaya maskulinitas tinggi cenderung memiliki sifat egois, mereka berfokus pada meningkatkan kekayaan material demi memperoleh pengakuan, sehingga tendensi untuk melakukan kecurangan juga menjadi lebih tinggi. Orientasi pengakuan atas kesuksesan tinggi yang condong pada perilaku kecurangan ini kemudian menyebabkan wajib pajak menjadi lebih agresif dalam upaya meminimalisir kewajiban pajaknya. Kecenderungan tersebut ditunjukkan melalui sikap memilih untuk mempertahankan keputusan dan menyanggah otoritas pajak dibanding bernegosiasi dengan mereka, bahkan ketika wajib pajak harus terlibat dalam gugatan pajak akibat kecurangan yang dilakukan. Wajib pajak akan berusaha memberikan bukti yang menjustifikasi kecurangan mereka sebagai tindakan yang benar menggunakan standar akuntansi perpajakan yang berlaku. Daya saing interpersonal yang tinggi dalam diri wajib pajak menyebabkan konfrontasi terhadap otoritas pajak untuk bertahan dengan pilihan mereka menjadi sesuatu yang memiliki peluang besar untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Seno et al., (2022) yang mengungkapkan bahwa dalam masyarakat dengan budaya maskulinitas tinggi, seseorang cenderung bersikap agresif dan kuat dalam hal pemecahan masalah.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi pun, yaitu *e-tax system* sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan, wajib pajak dengan budaya maskulin yang rendah cenderung lebih memandang positif penerapan *e-tax system* untuk mengurangi *tax evasion*. Individu yang tidak maskulin atau cenderung feminin lebih mendukung adanya kesetaraan gender, dimana ada proses pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik yang menstimulus lebih banyak pertukaran informasi dan membuat kemungkinan diadopsinya suatu teknologi menjadi lebih besar (Khalil, 2011). Penerapan *e-tax system* akan menjadi suatu hal positif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan kualitas kehidupan. Argumen ini didukung oleh penelitian Seno et al., (2022) yang menyatakan dalam budaya yang tingkat maskulinitasnya rendah, masyarakat percaya bahwa kehidupan yang berkualitas bagi semua orang dapat dicapai melalui pendanaan berbasis pajak. Pendanaan berbasis pajak ini tentu mengindikasikan perlunya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajibannya. Sedangkan wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi cenderung tidak memandang penerapan *e-tax system* sebagai suatu hal yang positif.

Sebagai budaya yang menekankan pada pencapaian, manfaat yang dapat dicapai dari adanya *e-tax system* menjadi aspek penting yang dilihat (Khalil, 2011). Sehingga ketika wajib pajak melihat implementasi *e-tax system* dalam pembayaran pajak tidak mencapai manfaat apapun, mereka cenderung memilih melakukan tindak kecurangan. Misal saja ketika *e-tax system* sudah diterapkan namun dana pajak yang terkumpul tetap dikorupsi oleh oknum pejabat hingga akhirnya menggunakan *e-tax system* dirasa sebagai pekerjaan yang sia-sia. Hal ini sesuai dengan konteks budaya maskulin menurut Hofstede (2011) dimana pencapaian diasosiasikan sebagai sesuatu yang berasal dari pekerjaan karena pekerjaan dianggap sebagai hal penting, bahkan lebih daripada keluarga.

Berbanding terbalik dengan paragraf diatas, budaya maskulinitas tinggi di sisi lain juga dapat menimbulkan pengaruh yang berlawanan. Wajib pajak dengan maskulinitas tinggi justru lebih cenderung tidak terlibat dalam kecurangan pajak. Bame-Aldred et al., (2013) menemukan bahwa wajib pajak dengan orientasi kesuksesan tinggi atau budaya ketegasan (dimana kedua nilai ini merupakan bagian dari budaya maskulinitas) biasanya menganut prinsip yang memotivasi diri mereka untuk menghindari membenarkan perilaku kecurangan pajak. (Basri, 2016) lebih lanjut menyatakan bahwa budaya maskulin tinggi cenderung kurang toleran terhadap para pelanggar hukum. Wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi akan lebih taat pada standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku sehingga mendukung transparansi laporan keuangan. Terkait pemanfaatan *e-tax system*, Zaidi et al., (2017) menemukan adanya hubungan positif antara kemudahan yang dirasakan wajib pajak dengan kepuasan mereka dalam menggunakan *e-tax*

system. Hal ini berarti *e-tax system* dilihat sebagai sarana yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jiwa kompetitif yang dimiliki wajib pajak dapat meningkatkan kedalaman dan luasnya adopsi *e-tax system* untuk keperluan pajak mereka. Ambisi mencapai kesuksesan tinggi yang diiringi dengan sifat kompetitif juga akan mendorong wajib pajak untuk mencari cara meningkatkan keuntungan tanpa memanipulasi laporan pajak mereka. Bahkan jika dihadapkan pada otoritas pajak, sifat kompetitif membuat wajib pajak memiliki rasa percaya diri untuk membuat keputusan sembari memberikan penalaran etis kuat yang mendasari keputusan tersebut untuk memperoleh tujuan pencapaiannya melalui jalur yang benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan *e-tax system* murni dilihat sebagai sarana yang bermanfaat mempermudah melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak tidak memiliki motivasi menggunakan *e-tax system* sebagai sarana melakukan kecurangan pajak karena budaya orientasi pada keberhasilan yang mereka miliki menekankan pada penerapan aturan main yang setara bagi setiap wajib pajak, serta sanksi tegas bagi wajib pajak yang berusaha menggelapkan pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa teori budaya Hofstede relevan karena mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memanfaatkan *e-tax system* untuk kecurangan pajak. Meskipun budaya individualisme wajib pajak ditemukan tidak memberikan pengaruh signifikan dalam pemanfaatan *e-tax system* untuk mengurangi kecurangan pajak, penemuan ini mengindikasikan implementasi *e-tax system* yang dalam praktiknya akan meningkatkan transparansi serta menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dinilai sebagai suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh otoritas pajak sebagai bentuk adaptasi di era digitalisasi. Dari sisi otoritas pajak, *e-tax system* ini dapat meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk pengambilan keputusan apakah wajib pajak melakukan kecurangan atau tidak. Sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya transparansi laporan keuangan wajib pajak dan kejujuran mereka dalam penyusunannya. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa implementasi *e-tax system* dilakukan oleh pemerintah bukan tanpa pertimbangan matang, sehingga dampak kebijakan tersebut merata bagi setiap wajib pajak dan harus dipatuhi. Namun di sisi lain, budaya maskulinitas wajib pajak justru ditemukan dapat menyebabkan pemanfaatan *e-tax system* untuk melakukan kecurangan pajak. Artinya, wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi resisten terhadap penggunaan *e-tax system* karena mampu meningkatkan transparansi data wajib pajak sehingga manipulasi data keuangan tidak lagi dapat mereka lakukan dengan mudah.

Pengaruh budaya maskulin yang meningkatkan kecurangan pajak ini memerlukan perhatian khusus pemerintah. Pemerintah perlu bersikap tegas dalam melaksanakan undang-undang perpajakan beserta sanksi yang mengikuti jika ada pelanggaran, serta lebih dari itu mewujudkan transparansi dalam pelaksanaannya. Seperti yang sudah dijelaskan, manfaat yang dapat dicapai dari penerapan *e-tax system* menjadi aspek penting bagi wajib pajak. Wajib pajak akan merasa penggunaan *e-tax system* sia-sia jika dana pajak yang mereka bayarkan disalahgunakan. Oleh karena itu, sikap tegas dari pemerintah dapat berperan sebagai bukti nyata bagi wajib pajak bahwa *e-tax system* yang diimplementasikan benar-benar bermanfaat untuk efisiensi dan efektifitas pengumpulan dana pajak.

REFERENCES

- Adeniyi, S. I., & Adesunloro, B. R. (2017). Electronic Taxation and Tax Evasion in Nigeria: A Study of LAGOS State. *Journal of Academic Research in Economics*, 9(November), 122–130.
- Akram, M. S., Malik, A., Shareef, M. A., & Awais Shakir Goraya, M. (2019). Exploring The Interrelationships Between Technological Predictors and Behavioral Mediators in Online Tax Filing: The Moderating Role of Perceived Risk. *Government Information Quarterly*, 36(2), 237–251. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007>
- Aldhian, B., & Damayanti, T. W. (2021). Efek Budaya Negara Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Moderasi Persepsi Atas Korupsi: Pendekatan Multicountry. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 239–254. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p239-254>
- Ali, M. A., Hoque, M. R., & Alam, K. (2018). An Empirical Investigation of The Relationship Between E-government Development and The Digital Economy: The Case of Asian Countries. *Journal of Knowledge Management*, 22(5), 1176–1200. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0477>
- Alm, J. (2021). Tax Evasion, Technology, and Inequality. *Economics of Governance*, 22(4), 321–343. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00247-w>
- Andriani, L., Bruno, R., Douarin, E., & Stepien-Baig, P. (2022). Is Tax Morale Culturally Driven? *Journal of Institutional Economics*, 18(1), 67–84. <https://doi.org/10.1017/S1744137421000072>

- Babici, G., Crivelli, E., & Marinkov, M. (2019). Tax Administration Strength and Tax Efficiency in Emerging Europe: Lessons for Romania. *International Economic Journal*, 33(4), 741–756. <https://doi.org/10.1080/10168737.2019.1689283>
- Bame-Aldred, C. W., Cullen, J. B., Martin, K. D., & Parboteeah, K. P. (2013). National Culture and Firm-level Tax Evasion. *Journal of Business Research*, 66(3), 390–396. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.08.020>
- Bani-Mustafa, A., Al Qudah, A., Damrah, S., & Alameen, M. (2020). Does Culture Influence Whether a Society Justifies Tax Cheating? *Journal of Financial Crime*, 27. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0031>
- Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Gaber, S., & Gruevski, I. (2018). The Influence of Tax Culture in Improving the Tax Compliance. *Journal of Economics*, 3(2), 80–88.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction With Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas By Power and Trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/J.NEWIDEAPSYCH.2014.12.001>
- Hambali, A. J. H. (2020). The Success of E-Filing Adoption during COVID 19 Pandemic: The Role of Collaborative Quality, User Intention, and User Satisfaction. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 57–68. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.2233>
- Hamilton, R., & Stekelberg, J. (2016). The Effect of High-Quality Information Technology on Corporate Tax Avoidance and Tax Risk. *Journal of Information Systems*, 31(2), 83–106. <https://doi.org/10.2308/isys-51482>
- Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. https://digitalcommons.usu.edu/unf_research/53
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context), 1–26. <https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=orpc>
- Khalil, O. E. M. (2011). E-Government Readiness: Does National Culture Matter? *Government Information Quarterly*, 28(3), 388–399. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.06.011>
- Kitsios, E., Jalles, J. T., & Verdier, G. (2022). Tax Evasion From Cross-border Fraud: Does Digitalization Make A Difference? In *Applied Economics Letters*. <https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2056566>
- Korostelkina, I., Dedkova, E., Varaksa, N., & Korostelkin, M. (2020). Models of Tax Relations: Improving The Tax Culture and Discipline of Taxpayers In The Interests of Sustainable Development. *E3S Web of Conferences*, 159, 06014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015906014>
- Lannai, D., Muslim, M., Afifah, A. N., & Ahmad, H. (2020). The Influence of Cultural and Religious Dimensions on Tax Fraud. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 287–296. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/8511>
- Liu, C., & Wu, S. S. (2020). National Culture, Legal Environment, and Fraud. In *Corporate Fraud Exposed* (Issue 1998, pp. 127–147). <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-417-120201008>
- Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and The Self: Implications For Cognition, Emotion, and Motivation. *Psychological Review*, 98(2), 224–253. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.98.2.224>
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs Increase Tax Compliance? Evidence On Taxpayer Responses to Technological Innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 172–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>
- McGee, R., Aljaaidi, K. S., & Musaibah, A. S. (2012). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 7(16), 1–12. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n16p1>
- Nam, T. (2018). Examining The Anti-corruption Effect of E-government and The Moderating Effect of National Culture: A Cross-country Study. *Government Information Quarterly*, 35(2), 273–282. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.005>
- Natasya, N., Tandililing, E. M., Angelus, M., & Kevin, K. (2019). Tax E-Filing System Acceptance Level on the Taxation Compliance: An Application of the UTAUT Approach. *The Winners*, 20(1), 33. <https://doi.org/10.21512/tw.v20i1.5572>
- Nguyen, L. A., O'Connell, B., Kend, M., Thi Pham, V. A., & Vesty, G. (2021). The Likelihood of Widespread Accounting Manipulation Within An Emerging Economy. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(2), 312–339. <https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2020-0041>

- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System in The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nurunnabi, M. (2017). The Myth of Tax Evasion In South Asia: The Case of A Lower-Middle Income Economy. *Advances in Public Interest Accounting*, 20, 85–133. <https://doi.org/10.1108/S1041-706020170000020005>
- Paoki, A. G. F., Yusha, J. D., Kale, S. E., & Mangoting, Y. (2021). The Effect Of Information Technology And Perceived Risk In Anticipating Tax Evasion. *Article Process Journal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 238–249. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.14871>
- Radzia, N. Z. M. (2020). Culture's Influence on Tax Non-compliance Among Small and Medium Sized Enterprise Owners in Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 420–435.
- Richardson, G. (2008). The Relationship Between Culture and Tax Evasion Across Countries: Additional Evidence and Extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.002>
- Rifat, A., Nisha, N., & Iqbal, M. (2019). Predicting E-tax Service Adoption: Integrating Perceived Risk, Service Quality and TAM. *Journal of Electronic Commerce in Organizations*, 17(3), 71–100. <https://doi.org/10.4018/JECO.2019070105>
- Seno, R., Hashim, H. A., Taha, R., & Abdul Hamid, S. (2022). The Influence of Hofstede's Cultural Dimension on Tax Compliance Behaviour of Tax Practitioners. *Asian Review of Accounting*, 30(1), 77–96. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2020-0153>
- Sullivan, E. (2020). Paradigms in Paying: A Cross-Cultural Examination of Behavioral Tax Response. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3691226>
- Tsakumis, G. T., Curatola, A. P., & Porcano, T. M. (2007). The Relation Between National Cultural Dimensions and Tax Evasion. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 16(2), 131–147. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2007.06.004>
- Umar, M. A., & Masud, A. (2020). Why Information Technology Is Constrained in Tackling Tax Noncompliance in Developing Countries: Nigerian Tax Administrators' Perspectives. *Accounting Research Journal*, 33(2), 307–322. <https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2018-0205>
- Usakli, A., & Kucukergin, K. G. (2018). Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Hospitality and Tourism: Do Researchers Follow Practical Guidelines? In *International Journal of Contemporary Hospitality Management* (Vol. 30, Issue 11). <https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2017-0753>
- Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can E-government Initiatives Alleviate Tax Evasion? The Moderation Effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>
- Walsh, K. (2012). Understanding Taxpayer Behaviour - New Opportunities for Tax Administration. *Economic and Social Review*, 43, 451–475.
- Wasao, D. (2014). The Effect of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in East of Nairobi Tax District. *International Journal for Management Science and Terchnology*, 2(3), 35–41.
- Wimayo, V. (2018). Perbedaan Compliance Cost Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Aplikasi E-filing Pada Wajib Pajak Badan Pengguna E-filing. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 1–11.
- Zaidi, S. K. R., Henderson, C. D., & Gupta, G. (2017). The Moderating Effect of Culture on E-filing Taxes: Evidence From India. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(1), 134–152. <https://doi.org/10.1108/jaee-05-2015-0038>
- Zhao, F. (2011). Impact of National Culture on E-government Development: A Global Study. *Internet Research*, 21(3), 362–380. <https://doi.org/10.1108/10662241111139354>
- Zhao, F., Wallis, J., & Singh, M. (2015). E-government Development and The Digital Economy: A Reciprocal Relationship. *Internet Research*, 25(5), 734–766. <https://doi.org/10.1108/IntR-02-2014-0055>

Plagiasi Satu Yenni Mangoting

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.ibs.ac.id

Internet Source

1%

2

repository.unand.ac.id

Internet Source

<1%

3

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1%

4

ejournal.uksw.edu

Internet Source

<1%

5

repository.petra.ac.id

Internet Source

<1%

6

123dok.com

Internet Source

<1%

7

ortax.org

Internet Source

<1%

8

core.ac.uk

Internet Source

<1%

9

repository.uhamka.ac.id

Internet Source

<1%

10	repository.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
13	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
14	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.esd-conference.com Internet Source	<1 %
16	adoc.pub Internet Source	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	jurnal.ugj.ac.id Internet Source	<1 %
19	penerbitan.pknstan.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.frontiersin.org Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %

22	doaj.org Internet Source	<1 %
23	docobook.com Internet Source	<1 %
24	journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
25	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
26	oration.fikom.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.acehinstitute.org Internet Source	<1 %
29	www.igi-global.com Internet Source	<1 %
30	Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti Yanti, Bahtiar Effendi. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022 Publication	<1 %

31

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

32

publikasi.mercubuana.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Plagiasi Satu Yenni Mangoting

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10